

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.1.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang dapat menggambarkan kondisi serta kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah dan memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia (Gabriel et al., 2021). Menurut BPS (2024), IPM menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil dari pembangunan melalui kesehatan, pendidikan, pendapatan, serta aspek lain yang dibutuhkan dalam mewujudkan kehidupan yang layak. IPM tidak hanya menangkap capaian rata-rata suatu negara atau daerah dalam aspek-aspek mendasar kehidupan manusia, tetapi juga mencerminkan tingkat pemerataan hasil pembangunan di antara penduduknya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR), sehingga memudahkan negara-negara untuk memantau kemajuan pembangunan manusianya di tingkat nasional maupun internasional.

Pengukuran pembangunan manusia di Indonesia mengikuti standar yang ditetapkan *United Nations Development Programme* (UNDP) dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*longevity*),

pengetahuan (*knowledge*), serta standar hidup layak (*living standards*). Ketiga dimensi tersebut diukur melalui empat indikator kunci, meliputi Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Dengan memadukan ketiga dimensi ini, IPM tidak hanya menilai kemajuan ekonomi, tetapi juga menekankan bahwa kesehatan dan pendidikan yang baik adalah modal dasar bagi manusia untuk dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan mencapai potensi hidup mereka. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM suatu wilayah tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih penting lagi, menunjukkan keberhasilan dalam investasi jangka panjang pada manusia sumber daya yang paling berharga untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

2.1.1.2 Tujuan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (1994), terdapat empat prinsip utama yang perlu diperhatikan agar pembangunan manusia dapat tercapai secara optimal, yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan. Keempat aspek tersebut menjadi landasan penting dalam mengarahkan proses pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia.

a. Produktivitas

Prinsip produktivitas menekankan bahwa masyarakat harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya, terlibat secara aktif dalam proses penciptaan pendapatan, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari

pembangunan manusia karena peningkatan produktivitas secara langsung memperkuat kemampuan individu untuk berkembang.

b. Pemerataan

Asas pemerataan menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dalam akses dan kesempatan terhadap seluruh sumber daya ekonomi dan sosial. Setiap individu, tanpa terkecuali, seharusnya memperoleh kesempatan yang sama untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu, berbagai bentuk ketidakadilan atau hambatan struktural yang dapat membatasi akses masyarakat harus diatasi agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi dalam aktivitas produktif yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup mereka.

c. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Prinsip keberlanjutan menekankan bahwa akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengabaikan hak generasi mendatang. Dengan kata lain, pembangunan harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya pada masa sekarang, tetapi juga di masa depan.

d. Pemberdayaan

Pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, serta dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Melalui pemberdayaan, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi turut menjadi subjek yang memiliki kendali dan dapat merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang diimplementasikan.

2.1.1.3 Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2010, UNDP memperbarui metode penghitungan IPM agar lebih mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif. Penyempurnaan ini dilakukan karena indikator sebelumnya, seperti Produk Domestik Bruto per kapita, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Melek Huruf (AMH) dianggap sudah tidak relevan untuk mencerminkan kualitas manusia yang sebenarnya. Dalam metode baru yang telah disesuaikan, menurut BPS (2019) IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik yang mencakup indeks harapan hidup, indeks pendidikan (yang terdiri dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta indeks pengeluaran. Perubahan ini menjadikan dimensi pendidikan lebih representatif, salah satunya melalui penggunaan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Adapun perhitungan untuk masing-masing komponen Indeks Pembangunan Manusia menurut BPS (2024) adalah sebagai berikut :

1. Indeks Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Data yang digunakan dalam perhitungan ini, yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Nilai Indeks UHH selanjutnya dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

2. Indeks Pengetahuan

Indeks pengetahuan diukur melalui dua indikator utama, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Harapan lama sekolah menunjukkan berapa tahun pendidikan yang diperkirakan akan ditempuh seorang anak pada usia tertentu di masa depan, dan perhitungannya dilakukan untuk penduduk berumur 7 tahun ke atas. Sementara itu, rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal. Nilai indeks untuk harapan lama sekolah dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Sementara itu, perhitungan indeks untuk rata-rata lama sekolah dilakukan menggunakan rumus berikut :

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Nilai indeks pengetahuan dihitung dengan menggabungkan indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah dengan rumus sebagai berikut :

$$I_{Pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

3. Indeks Pengeluaran

Dalam cakupan lebih luas, dimensi standar hidup layak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati masyarakat sebagai hasil dari meningkatnya kondisi ekonomi. UNDP mengukur dimensi ini menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang telah disesuaikan, sementara di

Indonesia pengukuran dilakukan melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan berdasarkan paritas daya beli. Adapun indeks pengeluaran dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$I_{Pengeluaran} = \frac{1n(Pengeluaran) - 1n(Pengeluaran_{min})}{1n(Pengeluaran_{maks}) - 1n(Pengeluaran_{min})}$$

Setelah seluruh komponen dihitung, Indeks Pembangunan Manusia diperoleh melalui rata-rata geometrik dari ketiga indeks dasar tersebut, yaitu :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{UHH} \times I_{Pengetahuan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$$

Hasil perhitungan IPM dinyatakan pada skala 0 hingga 100, di mana nilai yang semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusia di suatu daerah semakin baik, dan sebaliknya nilai yang rendah mencerminkan kondisi pembangunan manusia yang kurang baik. Berdasarkan skala tersebut, capaian IPM kemudian dikelompokkan ke dalam empat kategori nilai :

- a. $IPM < 60$: Rendah
- b. $IPM \leq 60$ $IPM < 70$: Sedang
- c. $IPM \leq 70 < 80$:Tinggi
- d. $IPM > 80$: Sangat Tinggi

2.1.1.4 Teori

1. Teori Kapabilitas

Teori Kapabilitas yang dikembangkan oleh Sen menjadi landasan filosofis utama dalam memahami pembangunan manusia. Sen menekankan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai proses memperluas *capabilities* atau kebebasan substantif yang memungkinkan individu menjalani kehidupan yang

mereka nilai berharga. Kapabilitas tersebut mencakup kemampuan untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan, dan menikmati standar hidup yang layak. Ahmad & Wasito (2023) menjelaskan bahwa pendekatan kapabilitas memberikan gambaran komprehensif tentang kesejahteraan masyarakat dengan menilai kemampuan aktual maupun potensial yang dimiliki individu untuk mencapai tujuan hidupnya. Pendekatan ini kemudian diadopsi oleh UNDP dalam penyusunan IPM, yang mengukur dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup sebagai bentuk operasional dari kapabilitas manusia.

Mahbub Ul Haq, seorang ekonom terkemuka dari Pakistan, bersama Sen mengembangkan konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran alternatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Haq (2017) menegaskan bahwa kesejahteraan suatu negara tidak dapat dievaluasi hanya melalui indikator ekonomi semata, melainkan harus mempertimbangkan kondisi sosial yang mencakup kesehatan, pendidikan, serta standar hidup penduduk. Melalui IPM, gambaran mengenai tingkat kesejahteraan manusia menjadi lebih komprehensif karena indikator ini menilai capaian masyarakat dalam tiga aspek mendasar tersebut.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.1.2.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perekonomian suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. PDRB menunjukkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi di suatu daerah, baik yang berasal dari sektor primer, sekunder, maupun tersier. Menurut BPS (2021), PDRB

didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan produksi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.

PDRB berfungsi sebagai ukuran kapasitas ekonomi daerah karena mencerminkan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut. Semakin besar nilai PDRB suatu daerah, semakin besar pula potensi ekonomi yang dimiliki untuk mendukung pembangunan, termasuk penyediaan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan (Sapaat et al., 2020).

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur daerah ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dapat dihitung menggunakan harga barang yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, PDRB sering digunakan sebagai indikator utama dalam analisis pertumbuhan ekonomi regional dan perencanaan pembangunan daerah.

2.1.2.2 Jenis Perhitungan Pendekatan Perhitungan PDRB

Menurut BPS (2021) terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur besaran PDRB, yaitu :

1. Pendekatan Produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendekatan ini mengelompokkan kegiatan ekonomi ke dalam 17 lapangan usaha, antara lain :

- 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Pengadaan Listrik dan Gas
- 5) Pengadaan Air Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- 6) Konstruksi
- 7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- 8) Transportasi dan Pergudangan
- 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- 10) Informasi dan Komunikasi
- 11) Jasa Keuangan dan Asuransi
- 12) Real Estate
- 13) Jasa Perusahaan
- 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- 15) Jasa Pendidikan
- 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- 17) Jasa lainnya

Rumus yang digunakan pada pendekatan produksi ini sebagai berikut

$$Y = (P1 \times Q1) + (P2 \times Q2) + \dots (Pn \times Qn)$$

Keterangan :

Y : Pendapatan Nasional

P : Harga barang

Q : Harga

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan merupakan metode perhitungan yang dilakukan dengan menjumlahkan nilai balas jasa akhir yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu wilayah pada tahun tertentu. Bentuk balas jasa tersebut adalah berupa upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Rumus yang digunakan dalam pendekatan pendapatan ini ialah sebagai berikut :

$$Y = R + W + I + P$$

Keterangan :

Y : Pendapatan Nasional

R : Bunga

R : Sewa

P : Laba

W : Gaji/Upah

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran menghitung PDRB berdasarkan penggunaan akhir barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah . Dalam pendekatan ini, PDRB merupakan penjumlahan dari beberapa komponen pengeluaran akhir, yaitu:

- 1) Konsumsi rumah tangga
- 2) Konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga
- 3) Konsumsi pemerintah
- 4) Pembentukan modal tetap domestik bruto
- 5) Perubahan inventori
- 6) Ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Rumus yang digunakan dalam pendekatan pengeluaran ini ialah sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan :

Y : Pendapatan nasional

C : Konsumsi rumah tangga

G : Pengeluaran pemerintah

I : Investasi

X : Ekspor

M : Impor

Ketiga metode perhitungan tersebut digunakan untuk memperlihatkan keterkaitan yang kuat antara tiga aspek utama perekonomian, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan, besarnya pendapatan yang diperoleh dari proses produksi, serta cara pendapatan tersebut dialokasikan. Keterkaitan ini dapat dirumuskan

melalui suatu hubungan matematis yang sederhana. Sejalan dengan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional, penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah juga dilakukan melalui tiga pendekatan yang sama, yakni pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Integrasi dari ketiga pendekatan tersebut mencerminkan titik keseimbangan antara sisi penawaran dan sisi permintaan dalam suatu perekonomian wilayah.

2.1.2.3 Teori

Menurut Sukirno (2006) dalam Sania et al. (2021) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan kondisi perekonomian dalam satu wilayah pada tahun tertentu dengan membandingkan kondisi perekonomian pada tahun sebelumnya. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam suatu daerah.

1. Teori Pertumbuhan Wilayah

Menurut Richardson (1991) dalam Wahyuni Ika et al. (2024) teori pertumbuhan ekonomi wilayah memiliki peranan yang sangat penting dalam kajian ekonomi regional dan perkotaan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu komponen utama dalam proses pembangunan wilayah serta memiliki implikasi kebijakan yang luas. Analisis pertumbuhan ekonomi wilayah bertujuan untuk menjelaskan perbedaan laju pertumbuhan antarwilayah, khususnya mengapa suatu daerah mampu berkembang lebih cepat dibandingkan daerah

lainnya. Pertumbuhan ekonomi wilayah didefinisikan sebagai peningkatan pendapatan masyarakat di suatu daerah yang tercermin dari kenaikan nilai tambah agregat atas dasar harga konstan. Kenaikan nilai tambah tersebut sekaligus mencerminkan besarnya balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut. Selain itu, tingkat kemakmuran suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang dihasilkan, tetapi juga dipengaruhi oleh arus transfer pendapatan, baik yang masuk maupun keluar dari wilayah lain.

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Adapun menurut Irianto et al. (2021) belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang akan menambah aset atau kekayaan daerah, belanja modal juga salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. Dengan kata lain, belanja modal tidak hanya digunakan untuk pembelian barang modal, tetapi juga untuk pembangunan, peningkatan, dan perbaikan infrastruktur yang memberi manfaat lebih dari satu tahun anggaran.

Dalam literatur ekonomi publik, belanja modal dikategorikan sebagai *public investment* karena pengeluarannya diarahkan untuk menciptakan dan memperbaiki

sarana prasarana yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Musgrave (1959) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam perekonomian, salah satunya adalah *allocation function*, yaitu menyediakan barang publik dan infrastruktur dasar yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh mekanisme pasar. Belanja modal termasuk dalam fungsi alokasi ini karena menyediakan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan, dan fasilitas umum lainnya yang membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Murniati (2022) belanja modal diklasifikasikan menjadi dua, yakni belanja publik dan belanja aparatur Konsumsi Umum (*public*) misalnya pembangunan *scaffolds*, *water system*, organisasi, bangunan sekolah, bangunan kesehatan, ambulan dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan langsung oleh daerah setempat. Sementara itu, belanja Aparatur adalah konsumsi yang tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat setempat namun dapat dirasakan oleh alat untuk membantu pekerjaan dan pekerjaan administrasi, seperti pembangunan gedung pertemuan, kendaraan dinas dan lain-lain. Dampak-dampak tersebut secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dengan demikian, belanja modal dapat dipahami sebagai alat strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup penduduk.

2.1.3.2 Kategori Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 sebagai penyempurnaan dari PP Nomor 24 Tahun 2005, belanja modal dibagi

ke dalam lima kategori utama. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenis aset tetap yang diperoleh pemerintah serta manfaat jangka panjang yang melekat pada pengeluaran tersebut. Adapun lima klasifikasi belanja modal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja ini meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menyiapkan tanah hingga dapat dimanfaatkan, mulai dari pengadaan atau pembelian, penyelesaian transaksi, pengalihan hak, maupun sewa tanah. Di dalamnya termasuk pula biaya untuk pengosongan dan pengurugan lahan, pembelian peralatan, penataan dan pematangan tanah, pengurusan sertifikat, serta berbagai pengeluaran lain yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah sampai siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Kategori ini meliputi pengeluaran untuk membeli peralatan dan mesin yang digunakan dalam operasional pemerintah. Contohnya termasuk kendaraan dinas, alat kesehatan, komputer dan perangkat teknologi informasi, mesin industri kecil, dan berbagai perlengkapan teknis lainnya. Pengadaan peralatan dan mesin bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi administrasi pemerintahan, serta mendukung kinerja sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administratif.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal ini mencakup kegiatan pembangunan, renovasi, atau pengembangan gedung dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan publik.

Pengeluaran ini meliputi seluruh biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, maupun penggantian yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung atau bangunan sehingga kapasitasnya meningkat dan pada akhirnya gedung dan bangunan siap digunakan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka penyediaan jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah dan dikuasai oleh pemerintah yang meliputi biaya awal pembangunan sampai siap untuk digunakan.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja ini digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap pemerintah yang tidak termasuk dalam kelompok tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, maupun peralatan dan mesin. Contohnya adalah belanja untuk aset tetap seperti koleksi perpustakaan, aset seni/kebudayaan, tanaman tahunan, atau jenis aset khusus lain yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan dapat digunakan berulang kali dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Belanja ini tetap dikapitalisasi sebagai aset tetap pemerintah dan akan disusutkan sesuai umur manfaatnya, sama seperti kelompok aset tetap lainnya.

2.1.3.3 Teori

1. Teori Keuangan Publik (*Public Finance Theory*)

Teori keuangan publik yang dikemukakan oleh Musgrave merupakan salah satu landasan utama dalam memahami peran pemerintah dalam perekonomian. Musgrave (1959) dalam Putra et al. (2025) menegaskan bahwa intervensi pemerintah diperlukan karena mekanisme pasar tidak selalu mampu menyediakan

barang dan jasa publik secara efisien maupun adil. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial.

Menurut Musgrave, terdapat tiga fungsi utama pemerintah dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh sektor swasta, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Dalam konteks ini, belanja modal menjadi instrumen penting karena diarahkan untuk membangun aset tetap yang memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan jaringan irigasi merupakan contoh konkret dari pelaksanaan fungsi alokasi pemerintah melalui belanja modal.

Fungsi distribusi bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan fiskal, baik dari sisi pengeluaran maupun penerimaan negara. Belanja modal yang diarahkan ke daerah tertinggal atau kelompok masyarakat kurang mampu dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Dengan demikian, belanja modal tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi berperan juga dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam IPM.

Sementara itu, fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas perekonomian, seperti pengendalian inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil, belanja

pemerintah, termasuk belanja modal, dapat digunakan sebagai instrumen untuk menstimulasi aktivitas ekonomi.

2.1.4 Kemiskinan

2.1.4.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Situasi ini ditandai oleh keterbatasan pendapatan yang menyebabkan ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, serta terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Menurut Soerjono Soekanto dalam Senewe et al. (2021) kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Sen dalam Rabani & Hutabarat (2025) mengembangkan konsep kemiskinan dengan mendefinisikannya sebagai keterbatasan kemampuan. Kemiskinan bukan sekadar didefinisikan sebagai kurangnya honorarium, melainkan ketidakmampuan guna meningkatkan kebebasan dan kapasitas dasar manusia, seperti kesehatan yang baik, pendidikan, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun menurut BPS (2025), kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan,

yang menekankan pada pemenuhan standar hidup minimum yang layak. Dengan pendekatan ini, seseorang dikategorikan miskin apabila tingkat pengeluarannya berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) yang telah ditetapkan.

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri atas dua komponen utama, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-makanan (GKNM). GKM dihitung berdasarkan nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan energi sebesar 2.100 kalori per orang per hari, yang bersumber dari komoditas makanan pokok yang umum dikonsumsi masyarakat. Sementara itu, GKNM mencakup kebutuhan dasar non-makanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Total dari kedua komponen tersebut membentuk Garis Kemiskinan yang menjadi ambang batas untuk menentukan status kemiskinan penduduk.

2.1.4.2 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2005) sebagaimana dikutip dalam (Soelistyo, 2023), kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu :

- 1) Pada tingkat mikro, kemiskinan terjadi akibat ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata.
- 2) Kemiskinan juga dipengaruhi oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia, di mana rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan berdampak pada produktivitas yang rendah.

- 3) Keterbatasan akses terhadap permodalan turut memperburuk kondisi kemiskinan, karena menghambat kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang produktif.

2.1.4.3 Konsep-Konsep Kemiskinan

Menurut Suharto (2005) dalam Soelistyo (2023), konsep kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis utama berdasarkan karakteristik dan penyebabnya. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan rendahnya pendapatan, melainkan merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan struktural.

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut merupakan kondisi ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Ukuran kemiskinan absolut umumnya ditentukan berdasarkan batas minimum kebutuhan hidup yang dinyatakan dalam garis kemiskinan. Apabila pendapatan atau pengeluaran seseorang berada di bawah batas tersebut, maka individu tersebut dikategorikan sebagai miskin secara absolut.

2) Kemiskinan Relatif

Menggambarkan kondisi kemiskinan yang dinilai dengan membandingkan tingkat kesejahteraan individu atau kelompok terhadap standar hidup rata-rata masyarakat. Dalam konteks ini, kemiskinan berkaitan erat dengan ketimpangan sosial dan ekonomi. Semakin besar kesenjangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah, maka semakin

besar pula proporsi penduduk yang dikategorikan mengalami kemiskinan relatif.

3) Kemiskinan Kultural

Merujuk pada kondisi kemiskinan yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan pola perilaku individu atau masyarakat yang tidak sejalan dengan dinamika perkembangan sosial dan ekonomi modern. Kemiskinan jenis ini muncul ketika individu atau kelompok kurang memiliki motivasi atau kemauan untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga sulit beradaptasi dengan perubahan dan peluang yang tersedia.

4) Kemiskinan Struktural

Merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakadilan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, permodalan, serta sumber daya ekonomi lainnya menyebabkan sebagian kelompok masyarakat terjebak dalam kondisi kemiskinan dalam jangka panjang.

2.1.4.4 Teori

1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*)

Teori lingkaran setan kemiskinan pertama kali diperkenalkan oleh Nurkse (1953) dalam Ramadanisa & Triwahyuningtyas (2022) melalui teorinya, menjelaskan bahwa kemiskinan membentuk suatu siklus yang saling berkaitan dan sulit untuk diputus. Rendahnya kualitas pendidikan dan kondisi kesehatan menyebabkan produktivitas tenaga kerja menjadi rendah, yang selanjutnya berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan. Kondisi tersebut mengakibatkan

individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga proses pembangunan manusia menjadi terhambat dan kemiskinan terus berlanjut secara berulang.

Inti dari teori ini adalah bahwa pendapatan yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung menjadi sangat terbatas. Rendahnya tabungan kemudian berdampak pada rendahnya tingkat investasi, baik investasi fisik maupun investasi sumber daya manusia. Akibatnya, kapasitas produksi dan produktivitas tenaga kerja tetap rendah, yang selanjutnya menghasilkan pendapatan yang juga rendah. Siklus ini terus berulang dan membentuk sebuah lingkaran yang memperkuat kondisi kemiskinan dari waktu ke waktu.

Dalam konteks pembangunan manusia, teori lingkaran setan kemiskinan menjelaskan bahwa masyarakat miskin umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi yang memadai. Keterbatasan tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan kesempatan kerja. Akibatnya, masyarakat tetap berada dalam kondisi kemiskinan dan sulit meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki hubungan yang erat dengan rendahnya capaian IPM.

Oleh karena itu, teori Nurkse menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui intervensi kebijakan, seperti peningkatan investasi publik, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan yang mendorong peningkatan kesempatan kerja. Tanpa adanya intervensi tersebut mekanisme pasar semata tidak

cukup untuk mengatasi kemiskinan struktural yang dihadapi oleh wilayah tertinggal.

2.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

2.1.5.1 Pengertian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja pada suatu wilayah dan periode tertentu. Penduduk usia kerja yang dimaksud oleh BPS adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Adapun TPAK menurut Maulina & Andriyani (2020) dalam Nugraha et al. (2025) mendefinisikan tenaga kerja sebagai penduduk yang telah atau sedang bekerja, mencari pekerjaan, melaksanakan aktivitas lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Secara operasional, angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Dengan demikian, TPAK menggambarkan sejauh mana penduduk usia kerja terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi, baik melalui pekerjaan maupun upaya untuk memperoleh pekerjaan.

BPS menggunakan indikator TPAK untuk menilai ketersediaan tenaga kerja potensial dan tingkat pemanfaatan sumber daya manusia dalam proses pembangunan ekonomi. Nilai TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja relatif besar, sedangkan TPAK yang rendah mengindikasikan masih besarnya penduduk usia kerja yang belum atau tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi, seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan.

Dalam konteks pembangunan manusia, TPAK memiliki keterkaitan erat dengan IPM, karena tingkat partisipasi tenaga kerja mencerminkan peluang masyarakat untuk memperoleh pendapatan, meningkatkan standar hidup, serta mengembangkan kapabilitas ekonomi dan sosialnya. Peningkatan TPAK yang disertai dengan kualitas pekerjaan yang baik berpotensi mendorong perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.5.2 Faktor-Faktor yang memengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK)

Menurut Kumayas (2024) terdapat faktor yang memengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yaitu :

- 1) Jumlah penduduk yang masih menempuh pendidikan berpengaruh terhadap besarnya angkatan kerja. Partisipasi sekolah sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas lembaga pendidikan serta tingkat pendapatan rumah tangga. Semakin besar proporsi penduduk yang masih bersekolah, maka jumlah angkatan kerja cenderung lebih kecil sehingga nilai TPAK menurun.
- 2) Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga. Semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga semakin kecil TPAK.
- 3) Kondisi pendapatan keluarga turut menentukan keputusan anggota rumah tangga untuk bekerja. Rumah tangga dengan beban biaya hidup yang tinggi dibandingkan tingkat pendapatannya cenderung mendorong lebih banyak anggota keluarga untuk memasuki pasar kerja, sehingga TPAK relatif meningkat.

- 4) Struktur umur penduduk memiliki peranan penting dalam menentukan TPAK. Kelompok usia muda umumnya belum memiliki tanggung jawab ekonomi yang besar dan sebagian besar masih berada dalam jenjang pendidikan, sehingga tingkat partisipasi kerjanya rendah. Sebaliknya, penduduk usia produktif, khususnya kelompok umur 25-55 tahun, terutama laki-laki, umumnya memiliki kewajiban sebagai pencari nafkah utama sehingga menunjukkan tingkat partisipasi kerja yang lebih tinggi. Sementara itu, penduduk berusia di atas 55 tahun mengalami penurunan kemampuan kerja yang berdampak pada rendahnya TPAK.
- 5) Tingkat upah berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja. Peningkatan upah yang ditawarkan akan mendorong lebih banyak penduduk usia kerja untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga TPAK meningkat.
- 6) Tingkat pendidikan juga menjadi faktor penentu, di mana semakin tinggi pendidikan yang dimiliki, semakin besar kecenderungan individu untuk bekerja. Hal ini terutama terlihat pada perempuan, di mana peningkatan pendidikan beriringan dengan meningkatnya partisipasi kerja.
- 7) Kegiatan perekonomian turut memengaruhi TPAK. Pelaksanaan program pembangunan membutuhkan keterlibatan tenaga kerja yang lebih besar dan sekaligus menciptakan harapan akan peningkatan kesejahteraan. Harapan tersebut mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pasar kerja, sehingga peningkatan aktivitas ekonomi umumnya diikuti oleh kenaikan TPAK.

2.1.5.3 Pengukuran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang termasuk angkatan kerja dibandingkan dengan keseluruhan penduduk usia kerja. Indikator ini juga dapat diartikan sebagai jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi dalam setiap per 100 penduduk usia kerja. Apabila penduduk usia kerja didefinisikan sebagai mereka yang berusia 15-64 tahun, maka:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja (15-64 tahun)}} \times 100\%$$

Dari rumus di atas maka dapat disimpulkan bahwa TPAK adalah, rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Jika golongan penduduk usia kerja lebih banyak masuk ke golongan angkatan kerja maka hal ini dapat meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Sebaliknya jika penduduk usia kerja lebih banyak yang masuk ke golongan bukan angkatan kerja maka akan menurunkan jumlah angkatan kerja dan akan menurunkan TPAK.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis menggunakan berbagai referensi yang berasal dari jurnal, artikel ilmiah, maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian terdahulu tersebut digunakan sebagai landasan untuk memahami hubungan antar variabel yang diteliti, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Selain itu, kajian penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai bahan perbandingan untuk melihat persamaan maupun perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dampak Kemiskinan, PDRB, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebuah Studi Empiris di Provinsi Riau Tahun 2018-2023 (Wijayanti & Raihansyah, 2024)	X= PDRB Y= IPM	X= Belanja modal, jumlah penduduk miskin dan TPAK	PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.	Jurnal Aplikasi Bisnis p-ISSN: 1411-4054/e-ISSN: 2579-3217
2.	Pengaruh Domestik Regional Bruto dan Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Rontos et al., 2023)	X= PDRB Y= IPM	X= Belanja modal, jumlah penduduk miskin dan TPAK	PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Bolaang Mongondow Selatan.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 23 No. 4 Bulan April 2023
3.	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung: Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Kemiskinan dan	X= PDRB Y = IPM	X= Belanja modal, jumlah penduduk miskin dan TPAK	PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung.	JESYA Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 8 No 1, Januari 2025 E-

No	Judul dan Penulis	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Produk Domestik Regional Bruto (Pratama & Nusrasi, 2025)				ISSN : 2599-3410 P-ISSN : 2614-3259
4.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia: Analisis Data Panel Provinsi (Apoda & Rumbia A, 2025)	X= Belanja Modal Y= IPM	X= PDRB, jumlah penduduk miskin dan TPAK	Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia.	JEP (Jurnal Ekonomi Pembangunan) Volume: 15 Issue: 1 Tahun 2025
5.	Belanja Desa Sebagai Determinan Indeks Pembangunan Manusia Pada 21 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Edon et al., 2023)	X= Belanja Modal Y= IPM	X= PDRB, jumlah penduduk miskin dan TPAK	Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Nusa Tenggara Timur.	<i>Journal of Management Small and Medium Enterprises</i> (SME's) Vol 16, No. 3, November 2023, p631-643
6.	Pengaruh PDRB , Kemiskinan, Pengangguran Dan Belanja Modal Terhadap IPM di 35	X= PDRB, jumlah penduduk miskin dan belanja modal	X= TPAK	PDRB memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan	<i>BISECE R (Business Economic Entrepreneur</i>

No	Judul dan Penulis	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten/ Kota Jawa Tengah Tahun 2011-2019 (Handayani & Woyanti, 2021)	Y= IPM		terhadap IPM, Jumlah Penduduk Miskin memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, Belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.	<i>neurship</i>) Vol. 4 No. 2, Juli 2021 P-ISSN: 2599-3097 E-ISSN: 2714-9986
7.	Pengaruh Jumlah Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bukittinggi (Saputra & Lubis, 2023)	X= Jumlah penduduk miskin Y= IPM	X= PDRB, belanja modal dan TPAK	Jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Kota Bukittinggi.	Jurnal Bisnis Net Volume : 6 No. 2 Desember 2023 ISSN: 2621-3982 EISSN: 2722-3574
8.	Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2019 (Setiawan & Ariani, 2022)	X= Jumlah penduduk miskin Y= IPM	X= PDRB, belanja modal dan TPAK	Jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat.	Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3 No. 1 Januari 2022 P-ISSN: 2723 - 6692 dan

No	Judul dan Penulis	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					E-ISSN: 2723 - 6595
9.	Analisis Pengaruh PDRB Perkapita , Upah Minimum , Penyerapan Tenaga Kerja , Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020 (Hidayat & Perwithosuci, 2024)	X= Jumlah penduduk miskin Y= IPM	X= PDRB, belanja modal dan TPAK	Jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat.	EKONO MIKAW AN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 24, No.1 Juli 2024 P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
10.	Estimasi Model Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi (Hakiki et al., 2020)	X= TPAK Y= IPM	X= PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk miskin	TPAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.	Jurnal Akrab Juara Volume 5 Nomor 3 Edisi Agustus 2020 (32-45)
11.	Determinan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2021 (Husnun Nisa & Maria Benedictus, 2022)	X= TPAK Y= IPM	X= PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk miskin	TPAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi DKI Jakarta.	<i>Diponegoro Journal of Economics</i> Vol . 11, No. 4 (2022) 47-58 e-ISSN 2963-

No	Judul dan Penulis	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					1688, p-ISSN 2337-3814
12.	Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Umur 16 – 18 Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Yogyakarta (Karima & Afdal Samsuddin, 2025)	X= TPAK Y= IPM	X= PDRB, belanja modal jumlah penduduk miskin	TPAK tidak berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Yogyakarta.	Jurnal Keuangan Publik dan Perekonomian Berkelanjutan Vol. 9, No. 2, Juni 2025
13.	<i>Determinants of Human Development Index (HDI): A Regression Analysis of Economic and Social Indicators</i> (Singh et al., 2025)	X= PDB per kapita Y= IPM	X= Belanja modal, jumlah penduduk miskin dan TPAK	PDB per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.	<i>Asian Journal of Economics, Business and Accounting</i> Volume 25, Issue 1, Page 26-34, 2025; Article no.AJEB A.127030 ISSN: 2456-639X
14.	<i>The Impact of Poverty and Capital</i>	X= Kemiskinan dan	X= PDRB dan TPAK	Kemiskinan memiliki pengaruh	<i>International Journal</i>

No	Judul dan Penulis	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Expenditure on The Human Development Index in North Sumatra</i> (Sinaga & Surianto Zalukhu, 2022)	belanja modal Y= IPM		negatif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan Belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap IPM di Sumatera Utara.	<i>of Economics and Management Research</i> Politeknik Pratama Porwokerto E- ISSN : 2830-2508 P - ISSN : 2830-2664
15.	<i>Analysis of the Influence of Labor Force Participation, Open Unemployment Rate, Economic Growth and Education Level on the Human Development Index in Malang Regency</i> (Argawandani & Imaningsih, 2025)	X= TPAK Y= IPM	X= PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk miskin	TPAK tidak memiliki pengaruh terhadap IPM di Kabupaten Malang.	<i>International Journal of Business and Applied Economics</i> Vol. 4, No. 3, 2025: 979-992

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara PDRB, belanja modal, kemiskinan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap indeks pembangunan manusia.

2.2.1 Hubungan PDRB dengan IPM

Dalam teori kapabilitas yang dikemukakan oleh Sen dalam Ahmad & Wasito (2023), pembangunan tidak semata-mata dipahami sebagai peningkatan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai proses perluasan kapabilitas manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Pendapatan regional, yang dalam konteks daerah tercermin melalui PDRB dipandang sebagai sarana yang memungkinkan individu dan masyarakat memperluas pilihan hidupnya, seperti memperoleh pendidikan yang layak, akses kesehatan yang memadai, serta standar hidup yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan PDRB berpotensi memperkuat dimensi-dimensi utama IPM apabila pertumbuhan ekonomi tersebut mampu menciptakan ruang bagi peningkatan kapabilitas manusia secara nyata dan berkelanjutan.

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Raihan (2025) bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan PDRB, memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, selama pertumbuhan tersebut diarahkan secara inklusif dan merata. Penelitian oleh Wijayanti & Raihansyah (2024) dan (Sania et al., 2021) menunjukkan bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, artinya jika PDRB mengalami kenaikan maka IPM juga akan mengalami kenaikan. Sedangkan dalam

penelitian yang dilakukan oleh Murniati (2022) menunjukkan bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta berimplikasi pada peningkatan IPM, karena ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya perbaikan kualitas hidup masyarakat.

2.2.2 Hubungan Belanja Modal dengan IPM

Belanja modal merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teori kapabilitas yang dikemukakan oleh Sen dalam Iswahyudi & Asnawi (2024), pembangunan manusia dimaknai sebagai proses perluasan kemampuan dasar individu untuk mencapai kehidupan yang layak, terutama melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang memadai. Dalam konteks ini, belanja modal pemerintah daerah memiliki peran penting karena digunakan untuk membangun aset fisik dan infrastruktur publik yang menunjang penyediaan layanan dasar tersebut. Penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan serta infrastruktur pendukung melalui belanja modal secara langsung berkontribusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik, sehingga mendukung peningkatan kapabilitas individu yang tercermin dalam capaian IPM.

Hal tersebut sejalan dengan kajian empiris yang dilakukan oleh Murdaningsih et al. (2024) dan Handayani & Woyanti (2021) yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Artinya, peningkatan belanja modal dapat meningkatkan capaian IPM. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astriani et al. (2021) yang

menyimpulkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. Hal ini karena belanja modal bersifat jangka panjang, sehingga dampaknya terhadap komponen IPM khususnya pendidikan dan kesehatan tidak dapat dirasakan secara langsung dalam periode pengamatan yang relatif pendek.

2.2.3 Hubungan Kemiskinan dengan IPM

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pembangunan manusia karena berkaitan erat dengan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Berutu et al., 2024). Dalam perspektif teori kapabilitas Sen dalam Pradana et al. (2024) serta Ahmad & Wasito (2023), kemiskinan tidak semata-mata dipahami sebagai rendahnya pendapatan, tetapi sebagai kondisi keterbatasan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Sen menekankan bahwa kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan seseorang dalam mengakses dan memanfaatkan kesempatan dasar, seperti memperoleh pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, serta standar hidup yang pantas. Keterbatasan kapabilitas tersebut menyebabkan individu tidak mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan, sehingga berdampak langsung pada rendahnya capaian pembentukan IPM.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Saputra & Lubis (2023) dan Setiawan & Ariani (2022) membuktikan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Ketika kemiskinan menurun maka artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memilih termasuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan sehingga kemampuan ini akan berdampak pada

peningkatan IPM karena produktivitas juga meningkat. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh Maulana et al. (2022) dimana kemiskinan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM.

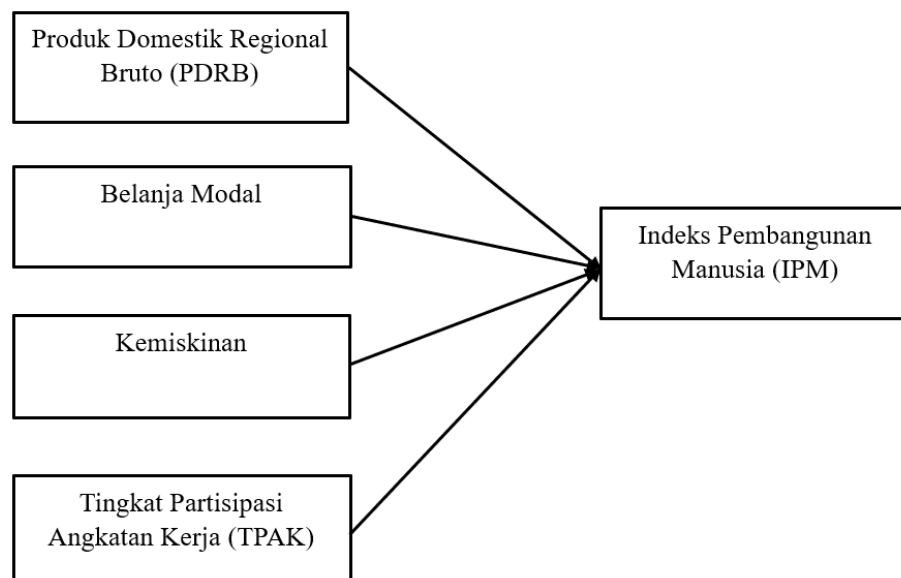
2.2.4 Hubungan TPAK dengan IPM

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencerminkan tingkat keterlibatan penduduk usia produktif dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Tingginya TPAK menunjukkan semakin besarnya proporsi penduduk yang berkontribusi dalam penciptaan pendapatan. Partisipasi tersebut membuka peluang bagi individu untuk memperoleh penghasilan, meningkatkan kesejahteraan, serta memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang merupakan komponen utama dalam pembentukan IPM.

Dalam perspektif pembangunan manusia, keterlibatan tenaga kerja berperan dalam memperluas kapabilitas dan kebebasan individu sebagaimana ditekankan dalam teori kapabilitas Sen dalam Ahmad & Wasito (2023). Kesempatan bekerja tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga memperkuat akses terhadap layanan dasar dan partisipasi sosial. Hubungan positif antara TPAK dan IPM ini didukung oleh penelitian dari Halawa & Manalu (2024) yang menyatakan bahwa meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja akan diikuti oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan semakin banyaknya lapangan pekerjaan dan semakin tingginya permintaan angkatan kerja, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian tersebut juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnun Nisa & Maria Benedictus (2022) dan (Hakiki et al., 2020) yang menyatakan bahwa TPAK memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap IPM. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Retnowati & Zumaeroh (2023) menemukan bahwa TPAK memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah disajikan dan diperkuat dengan penelitian terdahulu bahwa PDRB, belanja modal, kemiskinan dan TPAK akan diuji pengaruhnya terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mengetahui secara jelasnya mengenai kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara pada rumusan masalah yang ada. Dikarenakan sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empiris yang terkumpul. Maka, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial PDRB, belanja modal dan TPAK berpengaruh positif, sedangkan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024.
2. Diduga secara bersama-sama PDRB, belanja modal, kemiskinan dan TPAK berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024.